

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PENGELOLAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI KABUPATEN MEGELANG**

Fauziah Aulia Hafan¹, Endang Kartini Panggiarti²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar, aulia.al341@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Universitas Tidar, endangkartini2504@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the performance of regional financial management and its influence on poverty levels in Magelang District in the period 2015-2018. The research methodology used is quantitative descriptive analysis and linear regression analysis related to the ratio of regional finances and the percentage of poverty using secondary data from BPPKAD Magelang Regency and BPS Magelang Regency. The results showed that the performance appraisal of Magelang Regency is 1) low independence ratio, 2) poor capability ratio, 3) the harmony of spending ratio is still not compatible, 4) effective financial effectiveness ratio, 5) inefficient financial efficiency ratio, 6) financial growth ratio low. And the performance of regional financial management in Magelang Regency by calculation using financial ratios has no significant effect on poverty levels in Magelang Regency.

Keywords: *Work environment; Motivation; Employee Performance..*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan suatu masyarakat di daerah tersebut. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah atau APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pengelolaan

keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menilai kinerjanya adalah dengan melakukan analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh peraturan ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan lagi.

Penelitian ini mengambil data dari salah satu dinas pemerintahan di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan total penduduk sebesar 1.340.937 jiwa sesuai data per April 2020. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, maka tentunya pemerintah daerah memerlukan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan daerahnya agar tercapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Penghasilan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD). Selain itu nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan menghubungkannya dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan suatu masyarakat di daerah tersebut. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah atau APBD.

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Agustina dalam Pramita menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Halim dalam Lubis kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah ini dapat dilihat hasilnya

dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahmudi yang menyatakan bahwa laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa diberikan Gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan dan hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, atau politik.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan daerah yaitu pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari pendapatannya maupun belanjanya yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dan target anggaran di tahun berjalan.

Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs approach*) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan *Headcount Index*.

Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang dan sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Tingkat kemiskinan ini seharusnya dapat diturunkan dengan adanya kinerja pengelolaan keuangan yang baik dari pemerintah. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah maka dapat menggunakan beberapa rasio keuangan. Seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan hasil yang bervariasi. Hasil dari penelitian Hamzah (2008) adalah rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Maiputra (2011) menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Kaliti (2011) menunjukkan rasio kemandirian dan efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Annisa (2011) menunjukkan bahwa rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang hendak peneliti ajukan adalah:

H1: Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

H2: Tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3: Tingkat efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

Indrianto dan Supomo (2009:249) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui pengamatan langsung dan survey. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Magelang yaitu data tentang Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018. Serta angka-angka yang bersumber dari data presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018.

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam analisis data, peneliti menguji data dengan menggunakan teknik atau metode analisis regresi linier sederhana, dengan bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows*. Teknik analisis ini dipergunakan untuk melihat pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan dan memperoleh gambaran secara menyeluruh hubungan antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemiskinan secara parsial maupun secara simultan. Populasi data yang digunakan adalah selama 3 tahun.

Model persamaan regresi :

$$Y = a + b.X_1 + e$$

$$Y = a + b.X_2 + e$$

$$Y = a + b.X_3 + e$$

$$Y = a + b.X_4 + e$$

$$Y = a + b.X_5 + e$$

$$Y = a + b.X_6 + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Kemiskinan

a = Konstanta

X₁ = Rasio Kemandirian

X₂ = Rasio Kemampuan

X₃ = Rasio Aktivitas

X₄ = Rasio Efektivitas

X₅ = Rasio Efisiensi

X₆ = Rasio Pertumbuhan

e = error

Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa faktor untuk menilai kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2008:232) adalah bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya. Rasio kemandirian dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2004: 150) berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk melihat pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
>25-50	Konsultatif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2001)

Sedangkan untuk melihat kriteria dalam menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemandirian
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Bisma dan Susanto (2010:77)

2. Rasio Kemampuan

Rasio kemampuan keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu diperoleh dibandingkan dengan besarnya seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Adapun pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan (%)	Tingkat Kemampuan
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Munir, dkk (2004)

3. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menurut Halim (2004) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas dapat dirumuskan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan bagaimana ukuran efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 %-100%	Efektif
80 %-90 %	Cukup Efektif
60 %-80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber : Bisma dan susanto (2010:78)

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Halim (2004) menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima. Rasio ini dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Tidak Efisien
90 %-100%	Kurang Efisien
80 %-90 %	Efisien
60 %-80 %	Cukup Efisien
<60 %	Sangat Efisien

Sumber : Bisma dan Susanto (2010:79)

5. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang digunakan cenderung semakin kecil. Rasio keserasian dapat diformulasikan atau dirumuskan dengan rumus sebagai berikut

a. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio), menurut Halim (2004:128) berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_{t_1} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}}$$

Di mana: t_0 = tahun awal dan t_1 = tahun akhir (Halim, 2004:150)

Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (basic needs approach) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan Headcount Index. Berikut adalah table berisi presentase tingkat kemiskinan pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Magelang yang dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Persentasi Tingkat Kemiskinan

Tahun	Presentase Tingkat Kemiskinan (%)
2015	13,07
2016	12,67
2017	12,42
2018	10,67

Sumber : Data BPS Kab. Magelang

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Pada penelitian ini akan diuraikan tentang hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Magelang berdasarkan rumus perhitungan diatas, kemudian mengujinya dengan alat statistic pada bahasan selanjutnya.

Hasil Perhitungan Rasio Analisis Keuangan Daerah

1. Rasio kemandirian

Berdasarkan rumus diatas maka hasil rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2019, maka dapat dilihat di Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat dan Pinjaman	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2015	Rp261.569.091.783	Rp1.080.097.852.660	24,22	Instruktif
2016	Rp288.485.678.128	Rp1.362.306.913.419	21,18	Instruktif
2017	Rp403.561.238.310	Rp1.407.243.138.226	28,68	Konsultif
2018	Rp325.089.093.092	Rp1.398.132.841.570	23,25	Instruktif
Rata-rata			24,33 %	

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya sebesar 24,22 % dan menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 21,18 %. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,68 % yang begitu signifikan. Namun, pada tahun 2018 tingkat kemampuan dari pemerintah daerah ini mengalami penurunan yang sangat drastic sebesar 23,24 %.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya pada tahun 2015-2018 dapat dilihat dari perhitungan rasio kemandirian tersebut masih kurang dan berpola instruktif. Yang mana berarti pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat membiayai sendiri kegiatannya atau masih membutuhkan peran dari pemerintah pusat.

2. Rasio Kemampuan

Adapun hasil perhitungan rasio kemampuan dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemampuan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Rasio Kemampuan (%)	Tingkat Kemampuan
2015	Rp261.569.091.783	Rp1.945.955.251.171	13,44	Kurang
2016	Rp288.485.678.128	Rp2.036.310.089.428	14,17	Kurang
2017	Rp403.561.238.310	Rp2.271.336.015.858	17,77	Kurang
2018	Rp325.089.093.092	Rp2.302.190.543.616	14,12	Kurang
Rata-rata			14,87 %	

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2018 untuk tingkat kemampuannya masih kurang. Sehingga pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

3. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2015	Rp261.569.091.783	Rp232.532.835.584	112,49	Efektif
2016	Rp288.485.678.128	Rp276.334.438.862	104,40	Efektif
2017	Rp403.561.238.310	Rp399.425.826.000	101,04	Efektif
2018	Rp352.089.093.092	Rp363.038.862.200	96,98	Tidak Efektif
Rata-rata			103,73 %	

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 tingkat efektifitas sebesar 112,49 %, pada tahun 2016 sebesar 104,40 %. Kemudian pada tahun 2017 tingkat efektifitasnya sebesar 101,04 % dan pada tahun 2018 sebesar 96,98 %. Efektifitas kinerja keuangan pada tahun 2015-2017 di Kabupaten Magelang tergolong efektif karena hasilnya menunjukkan di atas 100 %. Sedangkan pada tahun 2018 efektifitas kinerja keuangannya tidak efektif karena hasilnya menunjukkan kurang dari 100 %. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2015-2018 sudah efektif. Artinya pemerintah Kabupaten Magelang mampu mewujudkan dan mengupayakan PAD dari target yang ditetapkan di anggaran.

4. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2015	Rp1.744.730.814.575	Rp1.945.955.251.171	89,66	Cukup Efisien
2016	Rp2.073.797.409.332	Rp2.036.310.089.428	101,84	Tidak Efisien
2017	Rp2.451.441.154.742	Rp2.271.336.015.858	107,93	Tidak Efisien
2018	Rp2.486.540.561.169	Rp2.302.190.543.616	108,01	Tidak Efisien
Rata-rata			101,86	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil yang telah ada, dapat diketahui pada tahun 2015 dibawah 100 % yaitu sebesar 89,66 %. Dan pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 101,84 %, 107,93 %, dan pada tahun 2018 sebesar 108,01 %. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 kinerja keuangannya tergolong cukup efisien karena menunjukkan angka presentase kurang dari 100 %. Sedangkan pada tahun 2016-2018 kinerja keuangannya tergolong tidak efisien karena angka presentase menunjukkan lebih dari 100 % yang mana sesuai ketentuan kriteria di atas. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Magelang belum mampu menekan belanja yang begitu besar dan kurang sebanding dengan pendapatan yang diterimanya.

5. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja terdiri dari 2 rasio yaitu analisis rasio belanja tidak langsung dan analisis rasio belanja langsung. Hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel 11 dan 12 di bawah ini.

a. Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung (%)
2015	Rp1.197.532.083.049	Rp1.744.730.814.575	68,64
2016	Rp1.375.873.412.336	Rp2.073.797.409.332	66,35
2017	Rp1.440.436.939.257	Rp2.451.441.154.742	58,76
2018	Rp1.469.755.920.226	Rp2.486.540.561.169	59,11
Rata-rata			63,21

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 rasio belanja tidak langsungnya sebesar 68,64 % pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 66,35 %. Kemudian rasio belanja tidak langsung ini mengalami penurunan lagi pada tahun 2017 sebesar 58,76 %. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 59,11 %.

b. Analisis Rasio Belanja Langsung

Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Langsung

Tahun	Total Belanja Langsung	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung (%)
2015	Rp547.198.731.526	Rp1.744.730.814.575	31,36
2016	Rp697.923.996.996	Rp2.073.797.409.332	33,65
2017	Rp1.011.004.215.485	Rp2.451.441.154.742	41,24
2018	Rp1.016.784.640.943	Rp2.486.540.561.169	40,89
Rata-rata			36,79

Sumber : Data Diolah.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, pada tahun 2015 rasio belanja langsung di Kabupaten Magelang sebesar 31,36 %. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33,65 % dan 41,42 %. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 40,89 %.

Kesimpulan dari kedua hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan rasio belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 63,21 % dan rasio belanja langsung dengan rata-rata sebesar 36,79 %. Pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan.

6. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan uraian diatas, hasil dari perhitungan untuk rasio pertumbuhan pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Tahun Dasar	PADt0	PADt1	Rasio Pertumbuhan (%)
2015	2014	Rp242.448.677.267	Rp261.569.091.783	7,88
2016	2015	Rp261.569.091.783	Rp288.485.678.128	10,29
2017	2016	Rp288.485.678.128	Rp403.561.238.310	39,88
2018	2017	Rp403.561.238.310	Rp352.089.093.092	-12,75
Rata-rata				11,33

Sumber : Data Diolah.

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2017 rasio pertumbuhannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7,88 %, 10,29 %, dan 39,88 %. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sangat drastic yaitu sebesar -12,75 %

Hasil Uji Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil Analisis Regresi

a) Tingkat Kemandirian

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.370	5.767		1.971	.187
	TKr	.034	.236	.103	.146	.897

a. Dependent Variable: TKm

b) Tingkat kemampuan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.933	5.723		2.085	.172
	tkp	.018	.382	.034	.048	.966

a. Dependent Variable: tkm

c) Tingkat Aktivitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.642	6.559		.403	.726
	A	.151	.104	.719	1.462	.281

a. Dependent Variable: tkm

d) Tingkat Efektivitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.895	6.327		-.299	.793
	Efk	.136	.061	.845	2.232	.155

a. Dependent Variable: tkm

e) Tingkat Efisiensi**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.729	6.486		3.196	.086
	Efs	-.084	.064	-.682	-1.317	.318

a. Dependent Variable: tkm

f) Tingkat Pertumbuhan**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.889	.620		19.187	.003
	TP	.028	.028	.576	.996	.424

a. Dependent Variable: tkm

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil dari perhitungan analisis regresi di atas, dapat diketahui bahwa :

- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,897 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,966 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio kemampuan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,281 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio aktivitas tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,155 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,318 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.
- Berdasarkan nilai signifikansi : dari table Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,424 > 0,05$. Maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka peneliti menyimpulkan hasil analisis keuangan daerah dengan ringkasan pada tabel berikut ini.

Jenis Rasio	Rata-rata Rasio %	Keterangan
Rasio Kemandirian	24,33%	Rendah
Rasio Kemampuan	14,87%	kurang
Rasio Efektivitas	103,73%	Efektif
Rasio Efisiensi	101,86%	Tidak Efisien
Rasio Keserasian Belanja		Kurang Serasi
Rasio Belanja Tidak Langsung	63,21%	
Rasio Belanja Langsung	36,79%	
Rasio Pertumbuhan	11,33%	Rendah

Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan daerah pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Magelang yang mana untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan daerahnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya mandiri atau mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya. Hal tersebut berarti pemerintah pusat masih berperan

penting dalam hal pembiayaan untuk kegiatan tersebut. Namun dalam pengelolaannya sudah berjalan efektif, tetapi pada sisi keefisienannya belum efisien dan belanja kurang serasi ketika dilihat bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Ditambah dengan tingkat pertumbuhan PAD yang masih rendah.

Selain itu dari uraian diatas pada poin hasil analisis regresi untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat ringkasannya di tabel di bawah ini :

Model.	Sig.
Tkr (kemandirian)	0,897
TKp (kemampuan)	0,966
A (aktivitas)	0,281
Efk (efektifitas)	0,155
Efs (efisiensi)	0,318
TP (pertumbuhan)	0,424

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Magelang (rasio kemandirian, kemampuan, aktivitas, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah) terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang dalam tahun 2015-2018. Hal ini dikarenakan berdasarkan nilai signifikansi dari rasio-rasio tersebut hasil nilainya lebih dari ($>$) 0,05.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “rendah” dengan pola hubungan yang bersifat “instruktif”, artinya pemerintah daerah masih membutuhkan peran pemerintah pusat. Tingkat kemampuan dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan atau keserasian masih belum serasi antara belanja langsung dan tidak langsung. Efektifitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. Efisiensi keuangan di pemerintahan Kabupaten Magelang dalam kriteria “tidak efisien”. Ditambah dengan pertumbuhan keuangan yang masih dalam kriteria “rendah”.
2. Hasil analisis diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang dengan perhitungan menggunakan rasio-rasio keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan hal-hal di bawah ini:

1. Perlunya peningkatan penggalian potensi PAD Kabupaten Magelang untuk lebih meningkatkan besarnya PAD Kabupaten Magelang.
2. Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya sendiri, maka seharusnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang menurun secara signifikan. Artinya, pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Magelang haruslah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Magelang sehingga menurunkan angka kemiskinan.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Astutia, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, 1-18.
- Hendra Mizkan, K. R. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal SOROT*, 1 – 142.
- Ni Luh Nana Putri Ani, A. D. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3, 481-497.
- Syamsudin, B. T. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 15-27.